

ANALISIS WACANA KRITIS MODEL FAIRCLOUGH TERHADAP ARTIKEL KORAN “BOBBY NASUTION DORONG DAERAH PERCEPAT LAYANAN PERIZINAN BANGUNAN RUMAH BERSUBSIDI”

Efibora Siboro¹, Buana Pane², Eka Panjaitan³, Citra Mutiara Pasaribu⁴, Sarma Panggabean⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas HKBP Nommensen Medan

Email: efibora.siboro@student.uhn.ac.id¹, buana.pane@student.uhn.ac.id²,
eka.panjaitan@student.uhn.ac.id³, citra.pasaribu@student.uhn.ac.id⁴

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi bahasa media dalam membingkai kebijakan publik melalui pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK) model Norman Fairclough. Objek kajian berupa teks berita berjudul “*Bobby Nasution Dorong Daerah Percepat Layanan Perizinan Bangunan Rumah Bersubsidi*” yang dimuat di media *Lintas 24* pada 24 Oktober 2025. Kajian ini berfokus pada bagaimana bahasa, struktur teks, serta praktik produksi media berkontribusi dalam membentuk makna ideologis dan legitimasi kekuasaan pemerintah daerah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis tiga dimensi Fairclough, yaitu: (1) analisis teks yang mencakup kosakata, tata kalimat, dan kohesi-koherensi; (2) analisis praktik wacana yang menelusuri proses produksi dan konsumsi teks media; serta (3) analisis praktik sosiokultural yang mengaitkan teks dengan konteks sosial, politik, dan ideologi pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks berita menampilkan wacana yang mendukung citra positif pemerintah daerah melalui pemilihan kata seperti “*dorong*”, “*percepat*”, dan “*layanan*” yang mencerminkan ideologi efisiensi birokratis. Media berperan tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen legitimasi politik yang mereproduksi wacana hegemonik pembangunan. Dimensi teks merupakan aspek paling dominan, sedangkan praktik wacana dan sosiokultural berfungsi memperkuat pesan ideologis yang terkandung dalam teks. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi model tiga dimensi Fairclough dalam mengungkap hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam media massa. Secara praktis, hasil penelitian ini menegaskan pentingnya kesadaran kritis terhadap teks media agar pembaca mampu mengenali konstruksi makna dan relasi kuasa yang tersembunyi di balik pemberitaan.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis, Fairclough, Media Lokal, Ideologi Pembangunan, Kebijakan Publik.

Abstract: This study aims to analyze the representation of media language in framing public policy through the Critical Discourse Analysis (AWK) approach of Norman Fairclough's model. The object of study is a news text entitled “*Bobby Nasution Encourages Regions to Accelerate Subsidized Housing Building Permit Services*” published in *Lintas 24* media on October 24, 2025. This study focuses on how language, text structure, and media production practices contribute to shaping the ideological meaning and legitimacy of local government power. The study uses a qualitative method with Fairclough's three-dimensional analysis,

namely: (1) text analysis that includes vocabulary, sentence structure, and cohesion-coherence; (2) analysis of discourse practices that trace the process of production and consumption of media texts; and (3) analysis of sociocultural practices that link texts to the social, political, and ideological contexts of development. The results of the study show that the news text displays a discourse that supports a positive image of local government through the choice of words such as "push", "accelerate", and "service" which reflect the ideology of bureaucratic efficiency. The media plays a role not only as a conveyor of information, but also as an agent of political legitimacy that reproduces the hegemonic discourse of development. The textual dimension is the most dominant aspect, while discourse and sociocultural practices serve to reinforce the ideological messages contained within the text. Theoretically, this study reinforces the relevance of Fairclough's three-dimensional model in uncovering the relationship between language, power, and ideology in mass media. Practically, the results of this study emphasize the importance of critical awareness of media texts so that readers can recognize the construction of meaning and power relations hidden behind the news.

Keywords: *Critical Discourse Analysis, Fairclough, Local Media, Development Ideology, Public Policy.*

PENDAHULUAN

Di era transformasi birokrasi dan pembangunan publik, media massa memainkan peran strategis dalam membingkai kebijakan pemerintah dan merepresentasikan aktor-kunci kepada masyarakat. Artikel koran yang memuat judul *"Bobby Nasution Dorong Daerah Percepat Layanan Perizinan Bangunan Rumah Bersubsidi"* mencerminkan penggabungan agenda pembangunan sosial-ekonomi, pelayanan publik, serta legitimasi politik di tingkat daerah. Analisis wacana kritis diperlukan untuk memahami bagaimana bahasa dan struktur teks tidak sekadar menyampaikan informasi, tetapi juga mengkonstruksi makna-kepentingan tertentu. Dalam perspektif tersebut, pendekatan teori analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis, CDA) yang dikembangkan oleh Norman Fairclough menawarkan kerangka tiga dimensi yaitu dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosiokultural yang memungkinkan peneliti menelusuri relasi antara bahasa, institusi media, dan struktur sosial.

Lebih jauh, studi-terkini menyebut bahwa model tiga dimensi Fairclough telah banyak digunakan dalam analisis wacana media, urban research, dan isu kebijakan publik karena kemampuannya menautkan unsur mikro (bahasa) dengan makro (kekuasaan dan ideologi).

Dalam dimensi teks, Fairclough menekankan bahwa analisis harus mencakup pilihan kosakata (vocabulary), tata kalimat (grammar), kohesi dan koherensi serta struktur wacana secara keseluruhan. Pada kasus artikel yang dimaksud, kita akan melihat bagaimana pilihan kata seperti "dorong", "percepat layanan", "bangunan rumah bersubsidi", serta penggunaan

istilah birokratis seperti SIMBG, PTSP mencerminkan orientasi tertentu. Bahasa formal dan administratif ini menghadirkan citra pemerintah sebagai pelaku perubahan dan layanan publik sebagai fokus utama. Sebagaimana dikemukakan oleh Eriyanto (2001) bahwa kosakata dalam media bukan semata teknis, tetapi juga sarana pembedaan ideologi. Oleh karena itu, aspek linguistik tersebut tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan yang dihadirkan dalam teks. Pada dimensi praktik wacana, Fairclough membahas proses produksi teks (who, how, under what conditions) serta proses konsumsi/penerimaan oleh khalayak. Artikel koran ini sebagai produk media regional di Sumatera Utara mengandung praktik editorial, penggunaan sumber resmi (pejabat pemerintah), dan distribusi berita yang membidik pembaca lokal-regional. Proses produksi tersebut menentukan bagaimana perspektif kebijakan dipresentasikan, sedangkan konsumsi oleh publik memengaruhi bagaimana wacana diterima atau ditantang. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa media lokal kerap mereproduksi wacana pejabat daerah dan kebijakan tanpa banyak kritik, menjadikan media sebagai agen legitimasi. Contoh: penelitian tentang editorial surat kabar Medan menunjukkan bahwa editor memilih posisi tertentu terhadap pemerintah daerah.

Dimensi praktik sosiokultural menyentuh konteks yang lebih luas: struktur sosial-politik, nilai budaya, dan ideologi yang melingkupi wacana. Menurut Fairclough, wacana tidak hanya dibentuk oleh struktur sosial, tetapi juga turut membentuknya — artinya ada hubungan dialektik antara wacana dan praktik sosial. Dalam konteks artikel tersebut, wacana percepatan perizinan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mencerminkan agenda pembangunan nasional dan nilai sosial keadilan. Namun di sisi lain, wacana tersebut juga dapat dilihat sebagai mekanisme hegemonik yang mengukuhkan posisi pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas dan masyarakat sebagai objek kebijakan. Haryatmoko mengingatkan bahwa dalam praktik media lokal Indonesia, idealisme kritis sering kali tergeser oleh orientasi pembangunan dan legitimasi politik.

Penelitian terkini di bidang perumahan bersubsidi dan media informasi menunjukkan bahwa media berperan sebagai kanal penting dalam menyosialisasikan program pemerintah. Misalnya, studi mengenai *“Media Informasi dalam Perwujudan Pemenuhan Perumahan dan Permukiman yang Berkelanjutan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah”* menunjukkan bahwa pemberitaan media memengaruhi akses dan persepsi publik terhadap perumahan bersubsidi. Selain itu, penelitian *“Analisis Kebijakan Perumahan Subsidi di Indonesia”* mengungkap hambatan struktural dalam pelaksanaan kebijakan subsidi perumahan.

Keterkaitan antara wacana media dan kebijakan publik menegaskan perlunya analisis kritis terhadap bagaimana media membingkai perumahan subsidi dan birokrasi perizinan yang mendampinginya. Berdasarkan kerangka teori Fairclough, penelitian ini akan menggunakan pendekatan tiga dimensi sebagai kerangka analisis. Pertama, dimensi teks di sini analisis akan mengidentifikasi dan menafsirkan fitur linguistik seperti kosakata, gaya kalimat, kohesi/koherensi serta implikasi ideologisnya. Kedua, dimensi praktik wacana meliputi bagaimana artikel tersebut diproduksi (redaksional, pemilihan sumber, genre berita), bagaimana didistribusikan, dan bagaimana kemungkinan diterima oleh pembaca. Ketiga, dimensi praktik sosiokultural mencakup konteks kebijakan perumahan bersubsidi, birokrasi perizinan daerah, serta hubungan kekuasaan dan ideologi pembangunan yang lebih luas. Teori Fairclough sangat relevan di Indonesia, terbukti dalam berbagai studi media kebijakan publik lokal dan nasional.

Dengan demikian, artikel ini berupaya memahami lebih jauh bagaimana koran lokal merepresentasikan kebijakan birokrasi perizinan rumah bersubsidi dan bagaimana bahasa serta praktik media membentuk makna serta legitimasi kebijakan tersebut. Melalui analisis tiga dimensi Fairclough, diharapkan muncul pemahaman kritis atas wacana yang tampak netral namun sarat makna ideologis dan kekuasaan: bukan sekadar laporan realitas, tetapi konstruksi dan reproduksi struktur sosial-politik. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan terhadap pemahaman wacana media lokal di Indonesia, terutama berkaitan dengan perumahan rakyat dan pelayanan publik, serta membuka ruang untuk refleksi kritis terhadap peran media dalam membentuk opini publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) model Norman Fairclough (1995). Pendekatan ini dipilih karena berfokus pada pemaknaan mendalam terhadap teks, praktik diskursif, dan konteks sosial yang melingkupi penggunaan bahasa dalam media. CDA digunakan untuk mengungkap relasi antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi sebagaimana dijelaskan Fairclough (1995) dan Van Dijk (1998), bahwa setiap teks media merupakan bentuk representasi kepentingan sosial tertentu.

Data utama dalam penelitian ini berupa teks berita berjudul “Bobby Nasution Dorong Daerah Percepat Layanan Perizinan Bangunan Rumah Bersubsidi” yang dimuat di media

Lintas 24 pada 24 Oktober 2025. Pemilihan teks ini didasarkan pada relevansinya dengan isu kebijakan publik dan representasi kepemimpinan daerah dalam media. Data pendukung diperoleh melalui dokumen kebijakan pemerintah, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu terkait analisis wacana media dan ideologi pembangunan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi pustaka. Teks berita dikaji secara menyeluruh untuk melihat aspek kebahasaan dan konteks penerbitannya, sedangkan literatur digunakan untuk memperkuat dasar teori dan kerangka analisis. Analisis data mengikuti model tiga dimensi Fairclough, yaitu: (1) analisis teks, yang menelaah kosakata, tata kalimat, serta kohesi dan koherensi teks; (2) analisis praktik wacana, yang menyoroti proses produksi dan konsumsi teks oleh media; serta (3) analisis praktik sosiokultural, yang mengaitkan teks dengan konteks sosial, politik, dan ideologi dominan dalam masyarakat.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi teori dan sumber data, yakni dengan membandingkan hasil analisis berdasarkan teori Fairclough, Van Dijk, dan Haryatmoko, serta memverifikasi isi berita dengan dokumen resmi dan media lain. Penelitian dilakukan di Sumatera Utara selama periode September–Oktober 2025, bertepatan dengan maraknya isu pelayanan publik dan pembangunan daerah. Pemilihan teori Fairclough dianggap paling relevan karena mampu mengintegrasikan analisis linguistik, institusional, dan sosial secara utuh, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam wacana media.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Artikel koran berjudul *“Bobby Nasution Dorong Daerah Percepat Layanan Perizinan Bangunan Rumah Bersubsidi”* yang terbit pada Jumat, 24 Oktober 2025, menjadi contoh menarik dalam memahami bagaimana bahasa media digunakan untuk membangun citra, kekuasaan, dan ideologi tertentu. Melalui pendekatan analisis wacana kritis (AWK) Fairclough, teks ini dapat dipahami bukan sekadar sebagai laporan berita, tetapi juga sebagai representasi sosial yang memproduksi makna dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada. Fairclough (1995) menjelaskan bahwa analisis wacana harus memandang bahasa sebagai bentuk praktik sosial yang berhubungan erat dengan relasi kuasa dan ideologi. Modelnya mencakup tiga dimensi utama, yakni dimensi teks, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosiokultural, yang saling terkait dalam membentuk dan mereproduksi wacana.

Pada dimensi teks, analisis difokuskan pada unsur linguistik, meliputi pemilihan

kosakata, struktur kalimat, kohesi, koherensi, dan makna implisit yang dibangun dalam teks. Judul berita “*Bobby Nasution Dorong Daerah Percepat Layanan Perizinan Bangunan Rumah Bersubsidi*” memperlihatkan penggunaan kata kerja “dorong” yang memiliki konotasi positif, aktif, dan dinamis. Pilihan kata ini tidak netral; ia menunjukkan peran Gubernur Sumatera Utara sebagai aktor utama yang proaktif dalam mempercepat birokrasi. Frasa “layanan perizinan bangunan rumah bersubsidi” menegaskan orientasi pemerintah pada pelayanan publik, efisiensi, dan kepedulian terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam isi berita, muncul istilah teknokratis seperti *Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)* dan *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)* yang menunjukkan upaya modernisasi birokrasi. Kosakata tersebut mencerminkan semangat efisiensi, transparansi, dan digitalisasi pemerintahan, yang dalam analisis wacana kritis dapat diartikan sebagai simbol ideologi efisiensi birokratis. Eriyanto (2001) menyebut bahwa pilihan kata dalam teks media berfungsi menampilkan posisi dan kepentingan pihak tertentu, sehingga secara tidak langsung membentuk kesadaran publik tentang “pemerintah yang bekerja”.

Struktur kalimat yang digunakan dalam teks cenderung kompleks dan formal, menunjukkan karakteristik bahasa administrasi pemerintahan. Kalimat seperti “Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution menginstruksikan seluruh kabupaten/kota di Sumut untuk mempercepat layanan perizinan bangunan” menegaskan relasi kekuasaan antara gubernur sebagai subjek aktif (pemberi instruksi) dan pemerintah daerah sebagai objek pelaksana kebijakan. Hubungan gramatikal ini memperlihatkan hierarki kekuasaan yang khas dalam teks-teks birokrasi, di mana pejabat publik diposisikan sebagai pemegang otoritas utama. Kohesi dan koherensi teks juga dibangun secara sistematis dengan penggunaan kata penghubung seperti “guna,” “terutama setelah,” dan “langkah ini,” yang menandai hubungan sebab-akibat dan memperkuat logika argumentasi. Kohesi leksikal tampak pada pengulangan kata “percepatan,” “layanan,” dan “perizinan,” yang memperkuat tema utama pemberitaan. Secara semantik, teks ini memproduksi makna bahwa kebijakan pemerintah adalah solusi dan tindakan positif untuk kemaslahatan masyarakat. Tidak terdapat nada kritis terhadap kebijakan tersebut; sebaliknya, teks membangun narasi heroik tentang kepemimpinan yang efisien dan peduli rakyat kecil. Dalam kerangka ideologis, hal ini menunjukkan reproduksi wacana hegemonik yang menempatkan pemerintah sebagai agen penyelamat dan masyarakat sebagai penerima manfaat pasif. Sebagaimana dikemukakan Van Dijk (1998), media sering kali menjadi alat untuk memperkuat citra positif kelompok dominan dan menormalkan struktur

kekuasaan yang ada melalui pilihan bahasa yang tampak netral.

Dimensi kedua, yaitu praktik wacana (*discourse practice*), berhubungan dengan proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks. Fairclough (1992) menegaskan bahwa teks media tidak pernah berdiri sendiri; ia adalah hasil dari praktik institusional yang melibatkan jurnalis, redaktur, dan institusi media. Artikel ini diproduksi oleh media lokal *Lintas 24*, yang fokus pada isu-isu pemerintahan daerah di Sumatera Utara. Pemilihan topik tentang kebijakan gubernur merupakan bentuk strategi redaksional untuk menampilkan citra positif pemerintah daerah, sekaligus menyesuaikan diri dengan agenda pembangunan nasional. Bentuk penulisan berita mengikuti format *straight news*, dengan dominasi kutipan langsung dari pejabat, yang menunjukkan model jurnalisme konvensional berbasis sumber resmi (*official source journalism*). Eriyanto (2012) menyebut bahwa praktik semacam ini menegaskan relasi kuasa antara media dan elite politik, di mana media berfungsi sebagai corong pemerintah daripada sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*).

Dalam hal distribusi, berita ini disebarluaskan melalui media cetak dan kemungkinan juga platform digital, menjangkau masyarakat Sumatera Utara yang menjadi khalayak utama. Teks semacam ini memiliki fungsi sosial untuk menyosialisasikan kebijakan pemerintah sekaligus membangun opini publik yang mendukung. Konsumsi teks oleh pembaca tidak bersifat kritis; nada berita yang positif dan informatif mengarahkan pembaca untuk mengafirmasi tindakan gubernur sebagai langkah tepat. Hodge dan Kress (1993) menyebut fenomena ini sebagai *preferred meaning*, yakni makna dominan yang diinginkan pembuat teks agar diterima tanpa perlawanan oleh pembaca. Dengan demikian, dalam praktik wacana ini, media memainkan peran ganda: sebagai penyampai informasi dan sekaligus sebagai agen legitimasi politik.

Dimensi ketiga adalah praktik sosiokultural (*sociocultural practice*), yang menempatkan teks dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas. Fairclough (2001) menegaskan bahwa setiap wacana terikat oleh kondisi sosial tertentu yang memungkinkan kemunculannya. Artikel ini muncul dalam konteks kebijakan nasional “program tiga juta rumah bersubsidi” yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam konteks sosial-politik Indonesia, isu perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi simbol kepedulian negara terhadap rakyat kecil sekaligus alat politik untuk membangun legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, wacana percepatan perizinan rumah bersubsidi tidak hanya berkaitan dengan efisiensi birokrasi, tetapi juga dengan citra politik

pembangunan yang berpihak kepada rakyat.

Secara sosial, teks ini merepresentasikan relasi kuasa yang hierarkis antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah digambarkan sebagai pelaku utama yang menentukan arah pembangunan, sedangkan masyarakat ditempatkan sebagai penerima manfaat. Hal ini menggambarkan ideologi paternalistik yang masih kuat dalam birokrasi Indonesia, di mana pemimpin diposisikan sebagai figur pengayom. Dari sisi budaya politik, wacana tersebut menunjukkan upaya reproduksi nilai-nilai kepemimpinan modern yang efisien dan responsif, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang digaungkan sejak dua dekade terakhir. Namun, dari perspektif analisis wacana kritis, wacana tersebut juga bisa dipahami sebagai bentuk hegemoni Gramscian, di mana dominasi kekuasaan dijalankan tidak melalui paksaan, tetapi melalui konsensus dan persetujuan simbolik. Dalam hal ini, media berperan penting dalam membentuk kesadaran publik agar menerima dominasi tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Haryatmoko (2019) menyebut bahwa kekuasaan dalam wacana sering kali bekerja secara halus, melalui pengulangan simbol, narasi, dan pilihan bahasa yang meneguhkan ideologi dominan.

Konteks ekonomi dan politik yang melingkupi teks ini juga tidak bisa dilepaskan dari strategi pembangunan nasional yang menekankan pertumbuhan infrastruktur dan perumahan rakyat. Melalui pemberitaan semacam ini, media turut berkontribusi dalam membentuk opini bahwa pembangunan fisik adalah tolok ukur keberhasilan pemerintah. Wacana seperti ini mereproduksi paradigma pembangunan yang bersifat teknokratis, menempatkan keberhasilan pada percepatan prosedur administratif dan kuantitas hasil (jumlah rumah), tanpa banyak menyinggung aspek sosial seperti pemerataan akses atau partisipasi masyarakat. Dengan demikian, media menjadi sarana reproduksi ideologi pembangunanisme (developmentalism) yang telah lama mengakar dalam politik Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi teks merupakan dimensi yang paling dominan dalam artikel ini. Bahasa menjadi alat utama dalam membentuk citra positif pemerintah daerah. Pemilihan diksi, struktur kalimat, dan bentuk kohesi-koherensi dalam teks memperlihatkan orientasi kuat pada penyampaian pesan kebijakan secara positif. Dimensi praktik wacana dan sosiokultural hadir sebagai latar yang memperkuat makna teks, tetapi tidak mendominasi struktur wacana secara eksplisit. Artikel ini mencerminkan pola umum media lokal Indonesia yang cenderung berorientasi pada dukungan terhadap kebijakan pemerintah daerah dan kurang mengakomodasi kritik sosial.

Dalam perspektif ideologis, wacana yang dibangun dalam berita ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menanamkan citra pemerintah daerah sebagai agen efisiensi dan kesejahteraan rakyat. Bahasa yang digunakan bukan hanya sarana komunikasi, tetapi juga instrumen kekuasaan yang bekerja secara simbolik. Sebagaimana ditegaskan Fairclough (2001), setiap praktik kebahasaan selalu mengandung konsekuensi ideologis, karena ia membentuk cara berpikir dan bertindak masyarakat. Dengan demikian, analisis wacana kritis terhadap artikel ini memperlihatkan bahwa media tidak hanya melaporkan realitas, tetapi juga memproduksi dan meneguhkan realitas sosial-politik tertentu — dalam hal ini, realitas tentang pemerintah yang modern, cepat, dan peduli rakyat kecil, namun sekaligus hegemonik karena menempatkan masyarakat dalam posisi pasif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis wacana kritis dengan menggunakan model tiga dimensi Norman Fairclough, dapat disimpulkan bahwa teks berita berjudul *“Bobby Nasution Dorong Daerah Percepat Layanan Perizinan Bangunan Rumah Bersubsidi”* merepresentasikan praktik penggunaan bahasa media yang tidak netral, melainkan sarat dengan ideologi pembangunan dan legitimasi kekuasaan pemerintah daerah. Melalui pemilihan kata seperti “dorong,” “percepat,” dan “layanan,” media membangun citra positif terhadap figur pemimpin daerah sebagai sosok progresif dan responsif terhadap kepentingan publik. Secara linguistik, teks menunjukkan struktur kalimat yang dominan deklaratif dan bersifat persuasif, menandakan posisi media sebagai penyampai informasi yang mendukung kebijakan pemerintah, bukan sebagai pihak yang kritis terhadap pelaksanaannya.

Dari sisi praktik wacana, proses produksi berita memperlihatkan dominasi sumber resmi, yaitu pejabat pemerintah, yang menunjukkan keterikatan media dengan kekuasaan institusional. Penyusunan teks dengan kutipan langsung dari pejabat memperkuat konstruksi wacana yang mengarah pada legitimasi kebijakan publik. Media, dalam hal ini, berperan sebagai perantara ideologis yang menyalurkan kepentingan politik melalui narasi yang tampak objektif. Distribusi makna dalam teks ini menunjukkan bahwa media berfungsi bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen pembentuk opini dan persepsi publik terhadap efektivitas kepemimpinan daerah.

Pada dimensi praktik sosiokultural, teks berita tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik Sumatera Utara dan kebijakan nasional mengenai perumahan bersubsidi.

Wacana pembangunan dan pelayanan publik yang diangkat merefleksikan nilai-nilai ideologis seperti modernisasi, efisiensi birokrasi, dan kepemimpinan populis yang sering kali digunakan untuk membangun legitimasi politik. Dengan demikian, media menjadi bagian dari mekanisme reproduksi ideologi pembangunan yang menempatkan pemerintah sebagai pusat perubahan sosial, sementara masyarakat diposisikan sebagai penerima manfaat.

Ketiga dimensi analisis—teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural—menunjukkan keterkaitan yang erat dan bersifat dialektis. Struktur bahasa dalam teks merefleksikan praktik produksi berita yang berpihak pada otoritas, dan praktik tersebut pada gilirannya memperkuat struktur sosial yang hegemonik. Hal ini sejalan dengan pandangan Fairclough (1995) bahwa wacana memiliki peran ganda, yakni sebagai representasi realitas sekaligus sebagai sarana pembentukan realitas sosial. Dengan demikian, teks berita tidak sekadar menggambarkan kebijakan publik, tetapi juga membentuk pemahaman masyarakat mengenai relasi kekuasaan antara pemerintah dan rakyat.

Penelitian ini menegaskan bahwa analisis wacana kritis berperan penting dalam mengungkap relasi ideologis di balik teks media. Dalam konteks berita ini, bahasa digunakan sebagai instrumen simbolik untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan, menegaskan citra kepemimpinan, dan membingkai kebijakan publik dalam kerangka wacana pembangunan yang positif. Oleh karena itu, media tidak hanya menjadi refleksi dari realitas sosial, tetapi juga aktor yang aktif dalam pembentukan dan pemeliharaan struktur sosial-politik.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi model tiga dimensi Fairclough sebagai pendekatan yang komprehensif dalam menganalisis wacana media, karena mampu menghubungkan aspek mikro linguistik dengan aspek makro sosial dan ideologis. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kesadaran kritis terhadap teks media agar pembaca tidak hanya menerima pesan secara permukaan, tetapi juga mampu menafsirkan makna ideologis di baliknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa wacana media tentang kebijakan publik dalam teks yang dianalisis lebih dominan merepresentasikan dimensi sosiokultural, karena teks dan praktik wacananya tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari struktur sosial-politik dan ideologi pembangunan yang sedang berlangsung di masyarakat. Media melalui pilihan bahasanya berperan dalam mereproduksi nilai-nilai kekuasaan dan membangun legitimasi terhadap kebijakan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Humm, Maggie. (2002). *Feminism: A Reader*. Harvester Wheatsheaf.
- Tong, Rosemarie Putnam. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Westview Press.
- Mohanty, Chandra Talpade. (2003). *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*. Duke University Press.
- Sihombing, R. (2018). Perempuan Batak Toba dan Kemandirian Ekonomi di Pasar Tradisional Medan. *Jurnal Sosial dan Budaya*, 12(3), 45–58.
- Simanjuntak, M. (2020). *Feminisme Lokal dalam Masyarakat Batak*. Medan: Pustaka Andalas.
- Nainggolan, E. (2022). Perempuan dan Identitas dalam Budaya Batak Toba. *Jurnal Budaya Nusantara*, 14(2), 90–106.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications.
- Denzin, Norman K. (1978). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. McGraw-Hill.
- Nilan, Pam & Demartoto, Argyo. (2012). *Indonesian Youth, Work, and Family Life*. Routledge.